



The Effect Of Capital Expenditure And Local Revenue On Economic Growth In Cities And Regencies In Bengkulu

Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kota Dan Kabupaten Di Bengkulu

Tania Hasibuan ¹⁾; Ahmad Soleh ²⁾; Abdul Rahman ³⁾
^{1,2,3)} Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu
Email: ¹⁾ taniahasibuan@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [17 November 2022]
Revised [27 Desember 2022]
Accepted [2 Januari 2023]

KEYWORDS

Capital Expenditure, Local Revenue, Economic Growth

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan utama pembangunan daerah adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, termasuk di dalamnya pemerataan pendapatan antar daerah (PAD). Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan ketimpangan pendapatan rendah dapat dicapai namun keduanya tidak dapat dicapai secara bersamaan. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pengaruh Belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kota dan Kabupaten di Bengkulu. Sampel dalam penelitian ini adalah 10 pemerintah daerah setingkat Kabupaten/Kota yang ada pada Kota dan Kabupaten di Bengkulu dengan periode penelitian dari tahun 2015 sampai 2020. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis. Hasil pengujian regresi diperoleh persamaan regresi $Y = 254,213 + 0,097X_1 + 0,025X_2$. Belanja modal (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kota dan Kabupaten di Bengkulu karena nilai signifikan sebesar 0,006 kecil dari 0,05. Artinya semakin meningkat PAD maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat. Pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi pada Kota dan Kabupaten di Bengkulu karena nilai signifikan sebesar 0,531 kecil dari 0,05. Artinya tinggi rendahnya PAD yang dihasilkan oleh suatu daerah tidak terlalu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena masih adanya bantuan dana dari pusat. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji F, hipotesis yang dibuat menunjukkan bahwa secara bersama-sama Belanja modal dan Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi pada Kota dan Kabupaten di Bengkulu. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai signifikansi 0,05. Koefisien determinasi sebesar 0,162 yaitu berarti perubahan pada variabel-variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 16,2%, sedangkan sisanya sebesar 1% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya diluar variabel independen yang digunakan di dalam penelitian ini.

ABSTRACT

The main objective of regional development is to create economic growth and equitable development, including inter-regional distribution of income (PAD). Fast economic growth and low income inequality can be achieved, but both cannot be achieved simultaneously. This study aims to determine the effect of Capital Expenditure and Local Revenue on economic growth in cities and regencies in Bengkulu. The samples in this study were 10 local governments at the district/city level in cities and regencies in Bengkulu with a study period from 2015 to 2020. The data collection method used the documentation method. The data analysis used was multiple linear regression, coefficient of determination and hypothesis testing. The results of the regression test obtained the regression equation $Y = 254.213 + 0.097X_1 + 0.025X_2$. Capital expenditure (PAD) has a significant influence on economic growth in cities and regencies in Bengkulu because a significant value of 0.006 is smaller than 0.05. This means that as PAD increases, economic growth will also increase. Local Revenue does not have a significant effect on economic growth in cities and regencies in Bengkulu because the significant value is 0.531, which is less than 0.05. This means that the high or low PAD generated by a region does not really affect economic growth because there is still funding from the center. Based on the results of testing the hypothesis with the F test, the hypothesis made shows that together capital expenditure and regional original income affect economic growth in cities and regencies in Bengkulu. The results of statistical calculations show a significance value of 0.05. The coefficient of determination is 0.162, which means that changes in the independent variables together are able to explain the dependent variable by 16.2%, while the remaining 1% is explained by other factors outside the independent variables used in this research.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Semakin besar tingkat pembangunan suatu negara mengindikasikan negara tersebut semakin maju dan berkembang (Wayan et al., 2015:8). Dimana pembangunan nasional berjalan selaras dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi menjadi sesuatu yang sangat penting karena ketika berbicara mengenai

pembangunan ekonomi berarti di dalamnya terdapat sebuah proses pembangunan yang melibatkan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan beberapa perubahan. Adanya pembangunan ekonomi bisa jadi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, begitu pula sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisis sebuah pembangunan nasional yang terjadi di suatu negara dan menjadi perhatian terutama pemerintah (Kusumawati & Wiksuana, 2018:19). Pertumbuhan ekonomi adalah proses kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan 2 pendapatan nasional.

Menurut Yuliana (2014:91) Pertumbuhan ekonomi merupakan output yang dihasilkan dari berbagai sektor yang memberikan gambaran bagaimana kemajuan atau kemunduran yang telah dicapai dalam sektor ekonomi pada suatu periode tertentu. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka kesejahteraan masyarakat akan terlihat jelas, karena tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang ada. Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama- sama dan berkesinambungan.

Pembangunan daerah menjadi bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu. Tujuan utama pembangunan daerah adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, termasuk di dalamnya pemerataan pendapatan antar daerah (PAD). Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan ketimpangan pendapatan rendah dapat dicapai namun keduanya tidak dapat dicapai secara bersamaan.

Oleh karena itu demi mencapai tujuan dari pembangunan tersebut diperlukan perencanaan pembangunan ekonomi yang baik karena pada dasarnya pembangunan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimiliki, dimana pada umumnya berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya. Produk Domestik Regional Bruto untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menggunakan Produk Domestik Regional Bruto sebagai alat ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi. Hal ini senada dengan teori menurut (Kusumawati & Wiksuana, 2018) menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah menggunakan PDRB atas dasar harga konstan

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Menurut (Wertianti & Dwirandra, 2013). Belanja modal dapat dikelompokkan menjadi lima kategori antara lain, belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya.

Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif (Wandira, 2013:9). Pemanfaatan belanja lebih baik dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, kemudian penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik, pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik (Wandira, 2013:15).

Menurut Mardiasmo (2015:98) akan lebih baik jika alokasi belanja daerah pemda di daerah lebih banyak digunakan untuk belanja modal yang berorientasi publik, sebab sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997, telah menyebabkan terjadinya penurunan kapasitas fiskal daerah yang berdampak pada semakin meningkatnya kesenjangan fiskal yang dihadapi daerah. Diharapkan dengan adanya peningkatan alokasi belanja modal maka akan menstimulasi perekonomian melalui kegiatan perekonomian yang produktif, yang nantinya akan berimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah sehingga kapasitas fiskal dapat meningkat kembali dan kesenjangan fiskal dapat diminimalisir. ditentukan dari besar kecilnya PAD. Sehingga jika Pemda ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka Pemda harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya

Pendapatan asli daerah yang dikemukakan oleh Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan



usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Suatu daerah dikatakan maju adalah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi.

Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal APBD nya akan semakin berkurang. Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan pendapatannya akan berimplikasi pada peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dimaksud diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang berfungsi untuk membiayai kebutuhan daerah tersebut seperti pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Laju perekonomian di suatu daerah juga dipengaruhi oleh sarana prasarana di daerah tersebut, semakin baik fasilitas sarana dan prasarana di daerah tersebut maka akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Siswiyanti, 2015:88).

Upaya peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada perkembangan PAD akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah memberikan kualitas pelayanan publik yang baik (Kusumawati & Wiksuana, 2018:19). Menurut (Mardiasmo, 2015:101) mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat belanja modal diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD.

LANDASAN TEORI

Akuntansi Pemerintah

Menurut Mentu dan Sondakh (2016:87) akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Akuntansi Pemerintahan mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya, seperti: mesjid, lembaga amal, yayasan, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan. Fungsi akuntansi pemerintah adalah menyediakan laporan akuntansi yang bermanfaat meliputi aspek kepengurusan administrasi pemerintah, serta membantu manajemen dalam melaksanakan pengawasan atas pengeluaran melalui anggaran, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pramudiana (2017:101) mengatakan akuntansi pemerintahan dapat disimpulkan sebagai suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasil dari proses yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Belanja Modal

Sejalan dengan diselenggarakannya otonomi daerah, daerah harus dapat mengembangkan daerahnya sendiri agar apa yang menjadi tujuan diselenggarakannya otonomi daerah dapat terlaksana. Untuk tu diperlukan banyak dana yang harus dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam 21 menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah belanja modal. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, rigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut Halim (2016:99) belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 29 persen dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010- 2014.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2017:101), pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Menurut Suparmoko (2016:55) Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah dan pendapatan daerah lainnya yang syah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini sesuai pasal 157 huruf a Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004,

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengamati, mengumpulkan informasi, dan menyajikan analisis hasil penelitian. Karena pada penelitian ini penulis menggunakan ilmu pengetahuan atau teori yang pernah diteliti oleh peneliti lain sehingga banyak memiliki acuan kepustakaan, variabel diketahui dan teori yang tersedia. Fakta atau realitas, objektif dan tunggal yang terpisah dari peneliti. Menurut Sugiyono (2015:8) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi datau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Belanja modal (X1) Terhadap Pertumbuhan ekonomi (Y) pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Bengkulu

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi pada Kota dan Kabupaten di Bengkulu, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05. Dengan persamaan regresi $Y = 254,213 + 0,097X_1 + 0,025X_2$. Hal ini menggambarkan bahwa semakin meningkat belanja modal maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat.

Belanja modal dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara dan dalam penelitian sebelumnya terdapat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa belanja modal memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.. Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang umum dipergunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran utama bagi negara- negara berkembang karena pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Maka dapat dikatakan bahwa apabila terjadi peningkatan belanja modal maka akan disertai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Ahmad Fajri (2016), dalam judul penelitiannya Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera dengan metode penelitian yang digunakan metode kuantitatif, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera.

Penelitian juga mendukung penelitian terdahulu yaitu Wardhiah (2018) dan Romi Daniel Tuwo (2021) bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pendapatan asli daerah (X2) Terhadap Pertumbuhan ekonomi (Y) pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Bengkulu

Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh Pendapatan asli daerah secara signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi pada Kota dan Kabupaten di Bengkulu, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,531 lebih besar dari 0,05. Hal ini menggambarkan bahwa semakin meningkat Pendapatan asli daerah maka pertumbuhan ekonomi daerah juga akan meningkat hal ini sesuai dengan hasil arah regresi yang positif namun tidak signifikan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang paling berkontribusi untuk menunjang pembangunan daerah dalam rangka desentralisasi. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka tingkat ketergantungan fiskal daerah tersebut kepada pusat semakin berkurang. Selanjutnya daerah lebih leluasa dan fleksibel dalam merencanakan alokasi anggaran sesuai dengan agenda ekonominya. Melalui belanja rutin, belanja pembangunan/infrastruktur, ataupun belanja lainnya, PAD sebagai sumber pembiayaan daerah diharapkan mampu menciptakan sejumlah aktivitas ekonomi baru dalam



masyarakat. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi pada masyarakat, akan terjadi peningkatan jumlah output barang dan/ atau jasa yang diikuti pula dengan meningkatnya jumlah uang beredar dari segi pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya hal tersebut akan meningkatkan nilai PDRB dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian tidak mendukung penelitian Dan Wardhiah (2018) dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh, dengan metode penelitian kuantitatif, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya tingkat alokasi belanja modal tidak secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya hubungan yang positif dari variabel tersebut maka semakin tinggi tingkat penerimaan pendapatan asli daerah maka alokasi belanja modal secara langsung juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Penelitian juga mendukung penelitian terdahulu yaitu Wardhiah (2018) dan Romi Daniel Tuwo (2021) bahwa PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Belanja modal (X1) dan Pendapatan Asli Daerah (X2) Terhadap Pertumbuhan ekonomi (Y) pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat adanya pengaruh secara bersama-sama antara belanja modal dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi padakota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan PDRB PDRB secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hasil pengujian regresi diperoleh persamaan regresi $Y = 254,213 + 0,097X_1 + 0,025X_2$
2. Belanja modal (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kota dan Kabupaten di Bengkulu karena nilai signifikan sebesar 0,006 kecil dari 0,05. Artinya semakin meningkat PAD maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat.
3. Pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi pada Kota dan Kabupaten di Bengkulu karena nilai signifikan sebesar 0,531 kecil dari 0,05. Artinya tinggi rendahnya PAD yang dihasilkan oleh suatu daerah tidak terlalu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena masih adanya bantuan dana dari pusat.
4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji F, hipotesis yang dibuat menunjukkan bahwa secara bersama-sama Belanja modal dan Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi pada Kota dan Kabupaten di Bengkulu. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai signifikansi 0,05.
5. Koefisien determinasi sebesar 0,162 yaitu berarti perubahan pada variabel-variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 16,2%, sedangkan sisanya sebesar 1% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya diluar variable independen yang digunakan di dalam penelitian ini.

Saran

1. Pemerintah Provinsi Bengkulu hendaknya memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah sebijak mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Pemerintah Provinsi Bengkulu sebaiknya meningkatkan belanja modal yang langsung dapat digunakan oleh masyarakat dalam meningkatkan perekonomian, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fajri. 2016. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera. e-
Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 5. No.1,
Arifin, Imamul, & Giana Hadi W., 2017, Membuka Cakrawala Ekonomi, PT. Setia Purna Inves, Bandung.

- BPS Provinsi Bengkulu. 2014. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Bengkulu
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam, 2017. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2016. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.
- Ida Ayu Saraswati dkk. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal dan Investasi Swasta sebagai Pemoderasi di Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.24.1.
- Imawan, Riswanda, dan Agus Wahyudin. 2014. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. Accounting Analysis Journal. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang
- Kusumawati dan Wiksuana. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, SIZE, dan Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2012-2016). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Mardiasmo. 2015. Perpajakan Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta.
- Mentu, Paula, Ezra dan Sondakh. Jullie J. 2016. Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Darah dan Dinas Sosial Prov. Sulut. Vol.4 No.1 Maret 2016, 1392-1399. ISSN 2303-1174
- Munawir. 2015. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.
- Nasrun, Ali, 2014. Urgensi Integrasi Sistem Informasi Akuntansi Instansi Pemerintah. Jurnal Teknik ITS Vol. 1 Surabaya: Balai Pustaka Fakultas Teknologi Informasi
- Praktikno. 2015. Perpajakan: Isu-isu Kontemporer. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Pramudiana, Agatha Arne. 2017. Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta
- Ramlan, D., & Abdullah, S. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah, 5(2).
- Rustendi, T. 2021. Analisis Tingkat Kemandirian keuangan Daerah Pasca Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Jurnal Visioner dan Strategi Vol 7 No. 1
- Siswiyanti, Pungky. 2015. Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening." Jurnal Akruak Akutansi,
- Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta
- Suparmoko, M, 2016. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Yogyakarta: Andi
- Suparmoko. Irawan. 2016. Ekonomika Pembangunan. Yogyakarta: BPFU Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia tahun 2012). Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Wayan Nuryanti Dew. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Langsung Di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 4, No. 11
- Yuliana. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi . JURNAL Akuntansi & Keuangan , 33- 48